

PENGEMBANGAN EKOWISATA SEBAGAI PENDEKATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR BERKELANJUTAN

Kasus Desa Blendung - Kabupaten Pemalang

Ir. Mukaryanti, MPSt
Adinda Saraswati, Ssi

Peneliti di Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan

Abstract

Ecotourism has been chosen as an approach to integrate conservation and economic development in Blendung Village, one of coastal villages in the north coast of Pemalang District. Most of its community depend their livelihood on fish ponds and jasmine plantation. The combination of fish ponds, jasmine plantation and mangrove conservation is expected to be tourist attraction, which ables to enhance the prosperity of local community as well as to recover the function of mangrove as a means for coastal protection that has been lost recently. In order to prepare Blendung Village as a tourist destination, an environmentally- sound tourism area plan was created, and the skill of local community to manage the acitities was developed. The main challenge in the development of ecotourism in Blendung Village is how to empower local community as well as local government, thereby all of those local potentials could be developed, which in turn a sustainable coastal zone could be achieved.

Kata kunci : *ecotourism, coastal resources management*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan mangrove merupakan salah satu komponen ekosistem pesisir yang bila berada dalam kondisi baik memiliki fungsi penting, baik sebagai pelindung pantai dari gelombang laut, tempat "parkir" air, dan menetralkan limbah, maupun sebagai habitat bagi berbagai jenis biota laut dan burung⁽¹⁾. Namun demikian, hutan mangrove Indonesia yang luasnya merupakan sekitar 76% dari seluruh luas hutan mangrove di Asia Tenggara, sebagian besar berada dalam kondisi rusak atau telah dikonversi antara lain menjadi tambak, pemukiman, kawasan wisata, dan pelabuhan. Pada tahun 2000 hutan mangrove Indonesia yang tersisa diperkirakan hanya 50%⁽²⁾. Adapun hutan mangrove yang ada di P.Jawa dan Nusa Tenggara hanya 1,2% dari total hutan mangrove Indonesia⁽³⁾. Dampak kerusakan dan hilangnya hutan mangrove yang cukup signifikan adalah meningkatnya intensitas abrasi pantai, dan pada daerah-daerah di zona subduksi, akan

menimbulkan kerusakan pantai yang berat pada saat terjadi bencana tsunami. Oleh sebab itu, konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove merupakan salah satu upaya pelestarian ekosistem lingkungan pesisir yang penting, dimana pelaksanaannya membutuhkan konsistensi dalam jangka panjang serta partisipasi aktif masyarakat.

Dewasa ini, ekowisata merupakan salah satu pendekatan untuk mewujudkan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Ekowisata didefinisikan oleh *International Ecotourism Society* sebagai : *a responsible travel to natural areas which conserves the environment and improves the welfare of local people*⁽⁴⁾. Sementara itu, menurut Hadinoto, ekowisata adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan keaslian lingkungan alam, dimana terjadi interaksi antara lingkungan alam dan aktivitas rekreasi, konservasi dan pengembangan, serta antara penduduk dan wisatawan⁽⁵⁾. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekowisata mengintegrasikan kegiatan pariwisata, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal,

sehingga masyarakat setempat dapat ikut serta menikmati keuntungan dari kegiatan wisata tersebut melalui pengembangan potensi-potensi lokal yang dimiliki. Selanjutnya, melalui penyelenggaraan kegiatan ekowisata di wilayah pesisir, keberadaan hutan mangrove sebagai salah satu ekosistem pesisir yang penting, dilindungi sekaligus dikembangkan sebagai atraksi wisata dengan berbagai kegiatan yang menarik seperti menyusuri sungai di tengah hutan mangrove (*boat cruising*), berjalan-jalan di atas hutan mangrove (*board walking*), menyaksikan burung-burung (*bird watching*) dan memancing, seperti dilakukan di Australia, Philippina, Thailand, dan Venezuela^(1,4). Di Indonesia, pemanfaatan hutan mangrove untuk ekowisata antara lain telah dilakukan di Denpasar, Bali dan Cikeong, Jawa Barat.

Belajar dari pengalaman yang telah dilakukan di tempat-tempat tersebut, pengembangan kegiatan ekowisata akan diterapkan sebagai salah satu pendekatan untuk mengatasi permasalahan semakin menurunnya luasan hutan mangrove di wilayah pesisir utara Jawa, khususnya di Kabupaten Pemalang. Untuk itu, potensi-potensi lokal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat lokal, serta potensi konservasi mangrove yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Pemalang perlu diidentifikasi dan selanjutnya diarahkan pengembangannya sebagai atraksi wisata yang berkualitas dan menarik bagi wisatawan. Desa Blendung, salah satu desa pantai di Kabupaten Pemalang dipilih sebagai lokasi model pengembangan ekowisata tersebut, karena adanya respons yang sangat baik dari masyarakat setempat, karena partisipasi masyarakat merupakan faktor penting untuk keberhasilan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan ekowisata.

1.2. Potensi Ekowisata Desa Blendung

Desa Blendung yang luasnya sekitar 250.000 ha berada di bagian Timur Laut Kabupaten Pemalang, dengan garis pantai sepanjang 1.275 meter yang langsung menghadap ke Laut Jawa. Saat ini, sebagian besar pemanfaatan ruang Desa Blendung adalah tambak, dimana luasnya pada tahun

2000 mencapai 129.000 ha atau 50% dari luas desa⁽⁶⁾. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, vegetasi mangrove dalam bentuk hamparan hampir tidak ditemui, melainkan hanya berupa deretan mangrove di sekeliling pematang tambak dengan total luas sekitar 40 ha, yang merupakan hasil pelaksanaan reboisasi dengan model tumpangsari tambak – mangrove sejak tahun 1993. Mengacu pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Pemalang, reboisasi mangrove harus dilakukan pada areal sepanjang pantai selebar 100 meter ke darat dalam bentuk *green belt* hutan mangrove. Rencana tersebut hanya dapat diimplementasikan dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat, mengingat bahwa sebagian besar areal yang diperuntukan sebagai kawasan lindung tersebut telah menjadi lahan tambak milik masyarakat⁽⁷⁾.

Selain budidaya tambak, budidaya kepiting di areal mangrove dan budidaya tanaman melati, khususnya jenis melati emprit (*jasminum sambac var. emprit*) juga merupakan salah satu mata pencaharian utama penduduk desa, yang jumlahnya sekitar 5.355 jiwa⁽⁸⁾. Kepiting berbumbu, yang sering disebut dengan “kepiting gemes” merupakan makanan khas Pemalang yang cukup digemari dan dicari oleh wisatawan. Demikian pula melati asal Pemalang merupakan produk pertanian yang cukup dikenal di Indonesia dan umumnya digunakan sebagai pengharum alami dan bahan campuran teh.

Embrio kegiatan pariwisata telah berkembang di Desa Blendung, khususnya pada kawasan Pantai Blendung. Pantai yang lokasinya sekitar 26 km dari Kota Pemalang tersebut saat ini telah menjadi ruang publik dan salah satu destinasi wisata di kabupaten Pemalang yang cukup dikenal, khususnya sebagai destinasi wisata budaya / keagamaan pada saat-saat dilakukan upacara tradisional setempat⁽⁹⁾. Segmen pasar utama Pantai Blendung adalah wisatawan nusantara (wisnus) yang berasal dari kota-kota di sekitar Pemalang. Kekuatan daya tarik alami Pantai Blendung yang menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya adalah panorama lepas pantainya yang indah.

Saat ini, untuk mencapai Pantai Blendung telah tersedia jalan penghubung dari jalur wisata Pekalongan – Pemalang - Tegal, walaupun kondisinya kurang baik. Ditinjau dari lokasinya yang berada dekat dengan Kota Pemalang, aksesibilitasnya yang cukup baik dengan Kota

Pekalongan dan Tegal, serta potensi pasar wisatawan yang ada, Pantai Blendung potensial dikembangkan lebih lanjut sebagai kawasan wisata skala regional.

2. KONSEP PENGEMBANGAN EKOWISATA DESA BLENDUNG

2.1 Konsep Pengembangan

Secara konseptual, pengembangan kegiatan ekowisata Di Desa Blendung Desa Blendung direncanakan untuk mengatasi permasalahan degradasi hutan mangrove sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat setempat melalui pengembangan potensi-potensi lokal sekaligus sebagai atraksi wisata. Dengan demikian, pengembangan kegiatan ekowisata Desa Blendung mengintegrasikan 4 komponen internal desa, yaitu (1) konservasi hutan mangrove, (2) keindahan panorama Pantai Blendung sebagai embrio atraksi pariwisata, (3) potensi kegiatan budidaya tambak dan melati dan kegiatan-kegiatan ikutannya (*multiplier effects*), serta (4) partisipasi masyarakat desa sebagai SDM pelaksana kegiatan.

Faktor penting dalam konsep ini adalah menjadikan mangrove tidak hanya berfungsi ekologis bagi kelangsungan ekosistem pesisir dan laut, tetapi juga memberi manfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat desa saat ini dan keberlanjutannya di masa mendatang. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi aktif mendukung program reboisasi dan konservasi mangrove. Berkaitan dengan itu, kebutuhan masyarakat terhadap fungsi mangrove perlu diciptakan, yaitu melalui pengembangan tambak ikan, udang dan kepiting model tumpangsari dengan mangrove atau *silvofishery*. Dalam hal ini, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang keunggulan model *silvofishery* dibandingkan tambak intensif. Selanjutnya, kegiatan *silvofishery* itu sendiri, produk yang dihasilkan, serta aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan di tambak, dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi atraksi yang menarik bagi wisatawan. Selain itu, pada lokasi-lokasi dimana masih memungkinkan dilakukan reboisasi mangrove skala luas, diperkenalkan pemanfaatan

mangrove untuk kegiatan wisata seperti *board walking* dan penangkaran burung.

Mengingat bahwa potensi kegiatan ekonomi lokal yang akan dikembangkan adalah berbasis pertanian, kehutanan dan perikanan, serta adanya kondisi keterbatasan sarana prasarana desa yang tersedia, maka pengembangan kegiatan ekowisata Desa Blendung harus terintegrasi dengan upaya pengembangan Desa Blendung sebagai suatu kawasan agropolitan. Friedmann memperkenalkan konsep agropolitan dalam rangka membangun desa pertanian yang dilengkapi dengan infrastruktur perkotaan, seperti jaringan transportasi, listrik, dan telekomunikasi, sehingga kegiatan produksi di pedesaan dapat berkembang dan mengurangi urbanisasi⁽¹⁰⁾.

Konsep pengembangan kegiatan ekowisata dapat diterapkan di Desa Blendung melalui kemitraan dengan pihak pemerintah daerah, pengusaha / swasta, masyarakat dan *stakeholder* terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat harus dilibatkan dalam keseluruhan proses pengembangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan monitoring, karena keberhasilan dan kegagalan dari proses pengembangan ekowisata sangat tergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan⁽¹¹⁾. Melalui kemitraan tersebut, perlu dirancang strategi promosi dan pemasaran yang sesuai.

2.2 Tahapan Pengembangan

Berdasarkan konsep di atas, pengembangan kegiatan ekowisata di Desa Blendung pada dasarnya merupakan suatu proses yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menjalin kemitraan dengan masyarakat setempat, khususnya masyarakat petani, Pemerintah Daerah yang meliputi Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Pariwisata, pengusaha tambak dan Instiper (Institut Ilmu Perikanan). Sejalan dengan itu, dilakukan pula sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mangrove dan manfaat kegiatan ekowisata dengan pendekatan komunikasi 2 arah.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya reboisasi mangrove dan manfaatnya bagi mereka, dalam rangka menumbuhkan kepedulian (*awareness*) dan

memotivasi masyarakat untuk melakukan rehabilitasi dan konservasi hutan mangrove secara swadaya sejalan dengan pengembangan budidaya tambak dan melati.

3. Membangun kemampuan masyarakat (*community capacity building*) dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas budidaya tambak dan melati sebagai kegiatan ekonomi yang potensial, meningkatkan kemampuan pemasaran, serta mempersiapkan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan ekowisata di desanya dan selanjutnya dapat memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.
4. Menerapkan teknologi produksi yang dapat meningkatkan produktivitas kegiatan usaha tumpangsari mangrove-tambak-melati dan mengarahkan pengembangannya tidak hanya sebagai unit produksi tetapi sekaligus sebagai atraksi wisata. Pada tahap awal, peningkatan produktivitas diprioritaskan pada budidaya tanaman melati melalui metode kultur jaringan sesuai dengan aspirasi sebagian besar petani yang diperoleh melalui survey⁽⁸⁾. Sedangkan peningkatan produktivitas budidaya tambak *silvofishery* akan dilakukan pada tahap selanjutnya.
5. Merencanakan Desa Blendung sebagai kawasan agropolitan, sebagai bagian integral dari RTRW Kabupaten Pemalang. Pengembangan Desa Blendung sebagai kawasan agropolitan sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pengembangan ekowisata di desa tersebut.
6. Mempersiapkan pengembangan dan penyediaan fasilitas pelayanan pariwisata di kawasan wisata Pantai Blendung sebagai implementasi *sitiplan* kawasan yang telah ada.

2.3 Hasil Yang Telah Dicapai

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan kegiatan ekowisata di Desa Blendung dibutuhkan proses yang panjang. Dalam waktu 2 tahun, beberapa hasil yang telah dicapai adalah :

1. Terjalannya kemitraan antara masyarakat Desa Blendung, dalam hal ini petani, dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bappeda Kabupaten Pemalang dan Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang dalam kegiatan peningkatan produktivitas budidaya melati. Untuk tahap selanjutnya, perluasan jaringan kemitraan perlu dilakukan yang melibatkan sebanyak mungkin stakeholder terkait, khususnya yang terkait dengan pengembangan pariwisata.
2. Terwujudnya 5 buah kebun percontohan budidaya melati emprit seluas 500 m² yang berasal dari hasil penerapan teknologi kultur jaringan. Dibandingkan dengan hasil stek yang biasanya dilakukan petani, pertumbuhan tunas serta produksi bunga dan minyak melati pada bibit hasil kultur jaringan lebih banyak dan lebih cepat, yaitu hanya 1 bulan. Sedangkan dengan stek membutuhkan waktu 8-10 bulan untuk berbunga. Sebagai gambaran, bila produktivitas melati hasil kultur jaringan pada minggu ke 28 180,006 kg/ha/hari, maka yang berasal dari stek hanya mencapai 71,187 kg/ha/hari⁽⁸⁾. Tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah pengembangan pusat pembibitan melati dengan kultur jaringan di Desa Blendung dan penerapan teknologi sederhana pengolahan minyak melati.
3. Sejalan dengan program peningkatan produktivitas melati, petani yang terlibat dalam percontohan ini mulai melakukan penanaman mangrove di sekitar kebun melati dan tambak yang dimiliki. Hal ini diharapkan akan ditiru pula oleh petani yang lain.
4. Bersama masyarakat, telah berhasil dirumuskan konsep pengembangan Desa Blendung sebagai kawasan agropolitan yang berbasis pada pengembangan budidaya tambak ikan, udang, kepiting dan budidaya melati, serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan, baik untuk menunjang kegiatan produksi maupun kegiatan pariwisata. Termasuk dalam konsep tersebut adalah zonasi lokasi-lokasi di luar tambak yang memungkinkan dilakukan reboisasi mangrove skala luas.

Hasil-hasil yang dicapai tersebut merupakan tahap awal sebelum kegiatan ekowisata itu sendiri dapat diselenggarakan di Desa Blendung. Masih dibutuhkan proses panjang menuju terwujudnya Desa Blendung sebagai kawasan ekowisata. Sejauh ini, respon

masyarakat terhadap kegiatan yang telah dilakukan serta rencana pengembangan ekowisata di Desa Blendung sangat baik. Respon masyarakat yang baik ini merupakan modal yang sangat penting untuk keberlanjutan upaya pengembangan ekowisata yang direncanakan.

Tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan ekowisata ini terutama dalam hal menjaga konsistensi semua pihak yang terkait terutama pihak pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Selain itu kreativitas dalam mengemas kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pertambakan dan perkebunan melati serta ekosistem mangrove sebagai atraksi wisata yang memiliki daya tarik juga merupakan tantangan yang membutuhkan kerjasama yang baik antar semua pihak serta ketajaman dalam melihat selera pasar ekowisatawan.

3. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengembalikan ekosistem mangrove pada wilayah pesisir yang telah beralih fungsi menjadi kawasan budidaya secara total adalah tidak memungkinkan. Dalam kasus demikian, perlu diciptakan kebutuhan masyarakat terhadap mangrove melalui pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkait dengan mangrove serta optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan yang masih tersisa untuk penanaman mangrove.
2. Pengembangan kegiatan ekowisata di wilayah pesisir merupakan sebuah pendekatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berkontribusi pada pelestarian ekosistem pesisir. Namun demikian, pengembangan ekowisata tidak dapat dilakukan tanpa keterkaitan yang saling bersinergi dengan program pengembangan wilayah. Dalam kasus seperti di Desa Blendung, pengembangan kegiatan ekowisata perlu dikaitkan dengan pengembangan desa sebagai kawasan agropolitan.
3. Untuk mewujudkan pengembangan ekowisata yang mampu memberikan *multiplier effect* kepada perekonomian lokal serta manfaat lingkungan dalam bentuk konservasi mangrove di wilayah pesisir, dibutuhkan proses yang panjang yang keberhasilannya sangat tergantung pada konsistensi semua pihak yang terkait serta dukungan masyarakat yang berpartisipasi secara aktif.
4. Respon yang baik dari masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya peningkatan kepedulian, wawasan, keterampilan dan kemampuan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki sehingga masyarakat dapat diberdayakan dan selanjutnya dapat secara mandiri mengelola keberlanjutan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hamilton, L.S and Snedaker, S.C (eds). 1984, Handboook for Mangrove Area Management, UNDP.
2. Suryadiputra, I.N.N. 2000, Konservasi dan pemanfaatan Rawa Pesisir Secara Berkelanjutan, Warta Konservasi Lahan Basah. 9 (1) : 6-8
3. Moosa, Mohammad K. 1999, Keanekaragaman Hayati Laut Nusantara: Suatu Tantangan Bagi Biologiwan Indonesia, Prosiding Sarasehan dan Pameran Konservasi Keanekaragaman Hayati Dalam Menyongsong Indonesia Baru, Rabu 23 Juni 1999, Fakultas Biologi Universitas Nasional Jakarta.
4. Western, David. 1993, Defining Ecotourism dalam Lindberg, Kreg dan Hawkins, Donald.E (Eds), Ecotourism : A Guide for Planners and Managers, The Ecotourism Society, hal 7-8.
5. Hadinoto, Kusudianto. 1996, Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
6. Badan Pusat Statistik. 2001, Kecamatan Ulujami Dalam Angka Tahun 2000, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang
7. Anonim. 2001a, Tata Ruang Agropolitan Blendung Berwawasan Lingkungan, Proyek Peningkatan dan Pemanfaatan Kawasan Pesisir di Kabupaten Pemalang, Laporan

- Akhir, Kerjasama Bappeda Kabupaten Pemalang dan BPPT.
8. Anonim. 2001b, Evaluasi Demplot Budidaya Melati Blendung, Laporan Akhir, Kerjasama Bappeda Kabupaten Pemalang dan BPPT.
 9. Anonim. 1999, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pemalang, Laporan Akhir, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
 10. Friedmann, J dan Douglass, M. 1976, Pengembangan Agropolitan: Menuju Siasat Baru Perencanaan Regional di Asia (terjemahan), United Nations Centre for Regional Development.
 11. Suhandi, Ary.S. 2001, Condition for Integrating Ecotourism Into Community, makalah dipresentasikan pada Seminar and Workshop on Ecotourism : Towards Sustainable Development in the Indonesian Tourism Industry, di Jakarta, 17 April 2001.